

## **SINJAI TV PROTOTIPE TELEVISI DAERAH DALAM PENYEBARAN INFORMASI BERITA POLITIK DIKABUPATEN SINJAI**

### ***Sinjai TV Prototype of Regional Television Spreading Information in Politics News in Sinjai District***

**Haryadi Jufri**

Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin, Makassar ([haryadijufri@gmail.com](mailto:haryadijufri@gmail.com))

#### **ABSTRACT**

*News show presented by television stations sometimes a political and faced many difficulties in maintaining its editorial independence. This study aims to determine the spread of political news on TV and categorize Sinjai (1) the presentation of political news editor of Sinjai TV (2) TV Sinjai position in the race for political power. This study uses a qualitative approach. This research was conducted in the district of Sinjai, Sinjai LPPL TV with determination informants consist of Government Sinjai, Sinjai Editor of TV, among several informants is Nipa Balang Village Society and Society Sub Biringere. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The primary data or main data in the form of interviews with informants and secondary data or supporting documents such as books, dissertations, theses, journals, articles, and internet. Informants consisted of sixteen people. Data collected in the form of interviews with informants. Data analysis using several theories. The results showed that (1) that the editorial policy of Sinjai TV in the process of presenting news local politics found their lack of obyektif information, which the editorial policy in the presentation of political news using the line hierarchy in the decision making the delivery of news from policy makers, (2) the position of media Sinjai TV in the race for political power there is a tendency to side with the regional government in the pick-fame through political news broadcast.*

**Keywords:** *Sinjai TV, editorial policy, dissemination of political news*

#### **ABSTRAK**

Tayangan berita yang disajikan oleh stasiun televisi terkadang bernuansa politis dan dihadapkan pada banyak kendala dalam menjaga independensi editorialnya. Penelitian ini bertujuan mengetahui penyebaran berita politik di Sinjai TV dan mengkategorisasi (1) penyajian berita politik redaksi Sinjai TV (2) posisi Sinjai TV dalam pertarungan kekuatan politik. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Sinjai, LPPL Sinjai TV dengan penentuan informan terdiri dari Pemerintah Kabupaten Sinjai, Redaksi Sinjai TV, diantara beberapa informan adalah Masyarakat Kelurahan Balang Nipa dan Masyarakat Kelurahan Biringere. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer atau data utama berupa hasil wawancara dengan informan dan data sekunder atau data pendukung berupa buku, disertasi, tesis, jurnal, artikel, dan internet. Informan terdiri atas enam belas orang. Data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan para informan. Data analisis menggunakan beberapa teori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bahwa kebijakan redaksi Sinjai TV dalam proses penyajian berita politik lokal ditemukan adanya ketidak obyektif informasi, dimana kebijakan redaksi dalam penyajian berita politik menggunakan jalur hirarki dalam menentukan keputusan penayangan berita dari penentu kebijakan, (2) posisi media Sinjai TV dalam pertarungan kekuatan politik terdapat kecenderungan berpihak kepada Pemerintah Daerah dalam mengangkat popularitas melalui berita politik yang disiarkan.

**Kata kunci :** Sinjai TV, kebijakan redaksi, penyebaran berita politik

## PENDAHULUAN

Televisi berkembang begitu cepat sejalan dengan perkembangan teknologi elektronika, telah menjadi fenomena besar di abad ini, perannya amat besar dalam membentuk pola dan pendapat umum, termasuk pendapat untuk menyenangi produk-produk tertentu, demikian pula perannya amat besar dalam pembentukan perilaku dan pola berpikir (Subroto dkk., 1994). Di Indonesia, masalah yang menyangkut pembangunan nasional hingga sejarah kejatuhan sebuah rezim dapat disaksikan, direkam bahkan dibentuk dalam muatan-muatan pesan yang disajikan dalam sebetuk teknologi Televisi ini, yang pada akhirnya mempunyai dampak yang berskala nasional bahkan internasional. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa. Sebab awal perkembangannya, komunikasi massa berkembang dari kata *media of mass communications* (Nurhidayat, 2005). Definisi komunikasi massa adalah yang mendukung pengertian di atas diungkapkan oleh Jay Black dan Frederick C. Whitney disebutkan *Mass communication is a process whereby mass produced message are transmitted to large, anonymous, and heterogeneous masses of receivers* (komunikasi massa adalah sebuah proses dimana pesan-pesan yang di produksi secara massal atau tidak sedikit itu disebarkan kepada massa penerima pesan yang luas, anonym, dan heterogen) (Mc.Quail, 1992). Terdapat berbagai macam pendapat tentang pengertian komunikasi massa. Ada yang menilai dari segmen khalayaknya, dari segi medianya, dan ada pula dari sifat pesannya. Komunikasi massa dapat didefinisikan sebagai proses komunikasi yang berlangsung di mana pesannya dikirim dari sumber yang melembaga kepada khalayak yang sifatnya massal, melalui alat-alat yang bersifat mekanis seperti radio, televisi, surat kabar, dan film (Cangara, 2014).

Sebagai media komunikasi massa yang penuh dengan tayangan-tayangan audio visual, bukan tidak mungkin televisi menjadi pusat perhatian. Mengapa orang memperhatikan media massa? Satu kemungkinan jawabannya ialah karena mereka berusaha menambah khazanah pengetahuan

(informasi) dan atau memperoleh bimbingan (opini) (Nimmo, 2000).

Tak dapat dipungkiri bahwa media massa khususnya pada televisi memegang peranan yang sangat penting dalam menyebarkan nilai dan ideologi-ideologi yang dimiliki media tersebut. Media televisi juga berfungsi sebagai alat kontrol aktor-aktor dalam sebuah pemerintahan, serta sebagai sebuah alat yang potensial dalam mendorong perubahan sistem sosial. Letak kekuatan media massa televisi pada konsep audio visual yang mampu menampilkan realita sosial di masyarakat. Kedekatan fenomena yang ditampilkan oleh masyarakat inilah yang menjadikan televisi sebagai penyebar informasi dengan fungsi persuasi yang paling besar.

Tayangan berita yang disajikan oleh stasiun televisi terkadang bernuansa politis sehingga dapat menyebabkan banyak persepsi serta mampu mempengaruhi pola pikir masyarakat. Media massa memang memiliki kekuatan untuk membentuk opini publik, sehingga bisa kita lihat dari apa yang terjadi di media massa saat ini. Kekuasaan media dalam menentukan agenda masyarakat bergantung pada hubungan mereka dengan pusat kekuasaan. (John & Kareen, 2009).

Dampak atau akibat penyebaran pesan melalui media massa terhadap khalayak luas akan terjadi secara kuat, dan mungkin tidak hanya terjadi dalam tahap kognitif dan afektif tetapi juga sampai pada tahap konatif (Muhtadi dkk., 1999). Kondisi ditengah kuatnya hegemoni negara dalam kehidupan media massa disatu sisi,serta solidnya akses kapitalisme dibalik kepemilikan serta pengelolaan media massa disisi lain. Hal ini menyebabkan media massa menjadi wilayah yang rentan, untuk menjadi sasaran intervensi berbagai kepentingan idiologis.( Unde, 2014).

Kekuasaan inilah yang menjadi tujuan dari para pemilik media. Relasi antara pengelola televisi dengan penguasa-penguasa daerah menjadi faktor yang sangat dominan dalam fenomena lahirnya televisi-televisi lokal belakangan ini dalam realitas faktual, dimana televisi lokal dihadapkan pada banyak kendala dalam menjaga independensi editorialnya.

Sebuah berita tidak mungkin objektif dan tidak mungkin bebas dari kepentingan-kepentingan tertentu (Meadow, 1980). Sebuah berita tidak mungkin menyajikan seluruh fakta sosial, terdapat proses seleksi terhadap fakta-fakta yang disajikan kepada pendengar atau pemirsa, karena semua peristiwa layak dijadikan berita. Dikatakan demikian, karena ada dua faktor yang menyebabkannya. Pertama, saat ini politik berada di era mediasi (politics in the age of mediation), yakni media massa, sehingga hampir mustahil kehidupan politik dipisahkan dari media massa. Yang terjadi malah para tokoh politik senantiasa berusaha menarik perhatian wartawan agar kegiatan politiknya mendapat liputan dari media massa. Kedua, peristiwa politik dalam bentuk tingkah laku dan pernyataan para aktor politik lazimnya selalu mempunyai nilai berita sekalipun peristiwa politik itu bersifat rutin belaka, seperti rapat partai atau pertemuan seorang tokoh politik dengan para pendukungnya (Hamad, 2004). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kebijakan redaksi Sinjai TV penyajian berita Politik.

## BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan paradigma penelitian deskriptif kualitatif bersifat deskriptif, yaitu menjelaskan fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data. Dalam hal ini pendekatan kualitatif digunakan untuk mengetahui dan menganalisis peran Sinjai TV sebagai prototipe televisi daerah yang independensi dan objektifitas dalam pemberitaan terkait penyebaran berita politik di Kabupaten Sinjai.

Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2005).

### *Lokasi dan Rancangan Penelitian*

Proses penelitian atau pengumpulan data dan informasi terhadap informan

dilakukan melalui wawancara langsung, dengan menggunakan pedoman wawancara, dimana masing-masing informan terdiri dari Unsur Pemerintah Daerah, Redaksi Sinjai TV, dan masyarakat yang bermukim di Kelurahan Balang nipa dan Kelurahan Biringere dengan jumlah Informan 16 orang.

### *Sumber Data*

Jenis data yang dikumpulkan terbagi atas dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu hasil wawancara mendalam dengan enam belas informan yang sudah ditentukan oleh penulis untuk mendukung isi penelitian tesis dengan judul “Sinjai TV Prototipe Televisi Daerah dalam Penyebaran Informasi Berita Politik di Kabupaten Sinjai”. Hasil wawancara tersebut berupa rekaman bertemu langsung dengan informan. Data sekunder yaitu hasil kajian pustaka berupa penelusuran buku, jurnal ilmiah, majalah, skripsi, tesis, disertasi, internet ataupun sumber informasi lainnya yang dapat membantu melengkapi serta menunjang penelitian ini.

### *Teknik Pengumpulan Data*

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Oleh karena itu, peneliti melakukan pengumpulan data dengan beberapa cara yaitu : bertemu langsung dengan informan, memeriksa hasil liputan berita dalam bentuk video dan mengamati pelaksanaan produksi berita politik dari penyajian hingga disiarkan kepada masyarakat.

## HASIL PENELITIAN

### *Kebijakan redaksi Sinjai TV dalam penyajian berita Politik*

Redaksi Sinjai TV dalam proses penyajian berita politik tidak sekedar langsung menayangkan apa yang menjadi hasil liputan kru media pada kegiatan-kegiatan yang menyangkut berita politik di kabupaten Sinjai, namun pemimpin redaksi tetap melakukan koordinasi dengan penanggung jawab Sinjai

TV yaitu Kepala Dinas Kominfo Budpar, layak atau tidaknya berita ditayangkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa hal yang paling urgen kebijakan redaksi di media Sinjai TV menerapkan kebijakan hirarki dalam mengambil keputusan sebelum informasi berita politik tersebut dikatakan layak siar. Keberadaan Sinjai TV dalam naungan Pemerintah Daerah sepertinya memang diciptakan untuk mengangkat citra Pemerintah Daerah dalam hal pembangunan yang dilaksanakan selaku pemilik media. Penyiaran informasi berita politik yang disajikan media Sinjai TV, juga menunjukkan adanya keberpihakan media terhadap obyek berita, sehingga berita politik yang ditayangkan pada Sinjai TV susah untuk berimbang. Obyektifitas berita dalam media sinjai TV terkadang mengandung unsur-unsur intervensi, sebab media Sinjai TV merupakan media milik pemerintah Daerah yang pemberitaannya. Gambaran tentang realitas yang dibentuk oleh isi media Sinjai TV menjadi dasar respon dan sikap masyarakat terhadap berbagai informasi berita politik yang disiarkan. Dengan demikian, apabila media salah dalam menyampaikan informasi akan memunculkan gambaran yang salah pula terhadap objek informasi yang disajikan. Untuk itu, media dituntut menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral massa. Namun demikian, disadari bahwa media yang dibawah kendali Pemerintah Daerah melalui hegemoni kepentingan tertentu dapat mempengaruhi faktualitas berita yang disiarkan.

### ***Posisi Sinjai TV dalam pertarungan kekuatan Politik di Kabupaten Sinjai***

Keberadaan media sebagai alat penyebarluasan informasi baik berkaitan dengan informasi (berita), hiburan dan pendidikan sangat berdampak positif bagi masyarakat dalam mengakses informasi, posisi Sinjai TV sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal dapat menjadi lembaga yang berfungsi secara netral dan independen. Keterkaitan posisi media Sinjai TV sebagai media milik pemerintah Daerah dalam hal penyebar luasan informasi politik lokal sangat riskan dengan intervensi terhadap kepentingan calon tertentu yang akan bertarung pada pesta demokrasi. Posisi media dalam perhelatan politik memang

sangat rentang untuk dijadikan pijakan dalam memuluskan Visi Misi calon tertentu dalam dunia politik, baik itu Pilkadaes, Pilkada, maupun Pileg dan Pilgub. Keberadaan Sinjai TV sebagai media independent sepatutnya mampu menempatkan diri sebagai corong informasi politik yang tetap memegang idealismenya dalam menyiarkan informasi yang obyektif kepada masyarakat, Media Sinjai TV yang berada dibawah naungan Pemerintah Daerah ini sulit untuk tidak berpihak kepada penentu kebijakan, posisinya dalam pesta demokrasi tetap berada pada jalur hirarki kebijakan dalam penayangan berita politik.

## **PEMBAHASAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa Media massa yang telah menjadi salah satu jika tidak bisa dikatakan sebagai satu-satunya lumbung informasi yang bersifat fundamental bagi khalayak ramai seperti politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya yang nyaris tak bisa dihindari paparannya oleh masyarakat yang telah bertransformasi sebagai sesosok “mahluk informasi”. Pengaruh ini sendiri didasari faktor jangkauan media massa baik secara geografis maupun dalam aspek demografis. Salah satu penjabaran teoritis yang mengupas fenomena superioritas media di tengah-tengah publik dapat dianalisis menggunakan konsep teori Agenda Setting Mc Combs dan Max. Kebijakan Redaksi Sinjai TV dalam penyebaran informasi berita politik dalam Teori agenda setting menitik beratkan pada asumsi bahwa “agenda redaksi di balik meja cokelat berukuran sedang, bisa menjadi agenda jutaan bagi masyarakat.” Hal tersebutlah yang menjadikan latar belakang pentingnya agenda kebijakan yang dijadikan agenda media hingga menjadi agenda publik yang diaplikasikan media Sinjai TV. Selain membuktikan korelasi tiga agenda utama arus informasi, yaitu agenda kebijakan, agenda media dan agenda publik, analisis agenda setting juga dapat mendeskripsikan bagaimana atensi masyarakat terhadap curahan informasi (yang dibungkus sedemikian rupa oleh pihak media) dan dipaparkan pada mereka sehingga konsep “mahluk informasi” dapat diamini sebagai identitas yang menjadi wajar masyarakat dewasa ini.

Dalam penelitian ini ditemukan Sinjai TV Sebagai Lembaga Penyiaran Publik dalam penyebaran informasi berita politik bahwa, pengambilan kebijakan redaksi tetap mengikuti jalur hirarki kebijakan dimana media Sinjai TV dalam penayangan berita politik tetap mengacu pada agenda Agenda Kebijakan Pimpinan Redaksi yang dijadikan agenda media oleh Pemerintah Daerah untuk menentukan kelayakan berita yang akan disiarkan kepada masyarakat menjadi agenda publik dalam pencitraan Pemerintah Daerah, Dalam teori agenda setting dijelaskan bahwa, dalam proses Agenda Setting media Sinjai TV bekerja dalam tiga tahapan yakni, Agenda Kebijakan.

Dari Teori agenda setting dalam hal ini Agenda Kebijakan ditemukan bahwa, Kebijakan Redaksi Sinjai TV dalam penyajian berita politik lebih banyak memuat kegiatan Pemerintah dalam menyiarkan informasi pencitraan dalam berita politik, kemungkinan dukungan media Sinjai TV kepada Pemerintah Daerah dalam peliputan berita politik menjadi angle pertama dan berita yang contra kepada Pemerintah tidak menjadi informasi yang layak siar, sehingga kebijakan penuh dalam pengambilan keputusan tetap pada jalur hirarki, dimana berita politik yang disajikan redaksi yang sebelum ditayangkan akan dikoordinasi kepada penanggung jawab Sinjai TV dalam hal ini Pemerintah Daerah Kepala Dinas Kominfo Budpar. alam penelitian ini menunjukkan penentuan agenda kebijakan redaksi di Sinjai TV, ditemukan bahwa efek kebijakan redaksi dalam penyiaran berita politik sangatlah besar dampaknya dengan informasi yang akan disiarkan, dalam menjalankan tugasnya, pemimpin redaksi dibantu oleh penulis naskah dan membawahi bagian produksi, kemudian membawahi beberapa divisi yang salah satunya adalah divisi produksi berita yang dipimpin oleh ketua produksi berita.

Kebijakan redaksional pada program berita politik di media Sinjai TV pada program acara Kareba 7 menghasilkan sebuah bentuk kebijakan redaksional pada rubrik acara yang tertuang dalam format-format program acara tersebut. Format kebijakan tersebut meliputi, penentuan sumber video, kategori liputan, durasi video, format peliputan, format gambar (terdiri dari, ukuran video, gambar yang boleh

dan tidak boleh dipakai), pengaturan jam tayang. Kebijakan redaksional dalam penyebaran berita politik di Sinjai TV terdiri dari kebijakan internal dan juga eksternal. Kebijakan internal merupakan ketentuan atau cara-cara yang disepakati oleh tim redaksi Program Acara Kareba 7 di Sinjai TV, yaitu tentang mencari, memilih, mengolah dan menyiarkan berita hasil liputan cameraman.

Dalam temuan Peneliti Kebijakan internal redaksi Sinjai TV mengacu pada Visi dan Misi “Yang mengedepankan tayangan sehat” sangat sulit untuk dilaksanakan hal tersebut berdasarkan temuan peneliti pada jalur hirarki media ini tetap melakukan koordinasi kepada penanggung jawab media yaitu Kepala Dinas Kominfo Budpar sehingga intervensi pemberitaan sangat mudah dilakukan apakah berita tersebut layak ditayangkan atau tidak sama sekali.

Dari pantauan peneliti dalam proses produksi berita politik di redaksi Sinjai TV terdapat tiga tahapan filter keputusan untuk memutuskan suatu tayangan dapat ditayangkan, filter I pada tahap ini adalah keputusan untuk menindak lanjuti sebuah tema dalam menentukan target liputan berita politik, kemudian pelaksanaan peliputan, lalu proses dengan input video hasil liputan, kemudian dilanjutkan dengan penulisan naskah berita. Setelah penulisan naskah berita selesai, pimpinan redaksi memeriksa berita tersebut sebelum masuk tahap editing kasar oleh editor. Filter ke II pada tahap ini semua video yang sudah diedit oleh editor produksi dan telah dilakukan dubber voice over, setelah tahap editing dilaksanakan, Tahap III, pimpinan redaksi melakukan koordinasi kepada Kepala Dinas Kominfo selaku penentu kebijakan dan memutuskan apakah berita politik yang kontra dengan Pemerintah tersebut dapat tayang atau tidak.

Unsur kedua dari agenda Setting adalah Agenda Media, dari temuan peneliti di media Sinjai TV diakui dalam penyajian informasi berita politik, jumlah tingkatan penonjolan berita politik yang melibatkan Pemerintah Daerah lebih dominan kearah yang baik dibandingkan berita politik yang kontra kepada Pemerintah, penyajian berita yang menjadi kebutuhan khalayak dalam berita politik yang menjatuhkan Pemerintah tetap

akan ditayangkan media Sinjai TV dengan bahasa yang mendukung kebijakan Pemerintah sehingga kebutuhan informasi kepada khalayak tidak terpenuhi dengan adanya agenda media ini. Penyajian berita politik yang menjadi target liputan media Sinjai TV seakan melupakan kaidah obyektifitas berita, liputan berita politik yang melibatkan Pemerintah merupakan menu wajib dari berita yang akan tayang. Dalam teori Agenda setting pada dimensi agenda media hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan redaksi Sinjai TV hanya digunakan pada proses penentuan target liputan hingga berita selesai dalam tahap editing, pada tahap penayangan jalur hirarki multak dikoordinasikan kepada penentu kebijakan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila ada berita politik yang kontra pada Pemerintah Daerah menjadikan informasi tersebut tidak layak siar, tidak bisa dipungkir media ini diciptakan untuk membranding citra Pemerintah bukan pada hal yang menjatuhkan citra Pemerintah dimata publik.

Posisi media Sinjai TV dalam perhelatan politik telah membuktikan eksistensinya, dari temuan peneliti netralitas informasi yang disiarkan oleh media Sinjai TV pada pesta demokrasi cenderung berpihak pada Pemerintah. Kenyataan tentang pentingnya media massa bagi para politisi rupanya telah lama disadari, perhelatan politik yang telah dilalui media Sinjai TV sejak tahun 2013 yang cenderung berpihak mengangkat popularitas calon tertentu. Unsur keberpihakan ini ditunjukkan pada loyalitas Sinjai TV kepada penentu kebijakan dalam pelaksanaan pesta demokrasi, sehingga intervensi kepada media dapat disaksikan langsung oleh pemirsa yang menyaksikan berita politik di media Sinjai TV.

Dari temuan peneliti berkaitan dengan teori Obyektifitas dalam unsur Faktualitas ditemukan bahwa, posisi Sinjai TV dalam perhelatan politik dalam menyiarkan berita tidak mengutamakan Faktualitas informasi yang akan disiarkan kepada masyarakat.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Sinjai TV, prototipe Televisi Daerah dalam penyebaran informasi berita politik dapat disimpulkan bahwa, Dalam

Penyajian berita politik, Kebijakan Redaksi media Sinjai TV seharusnya tetap diberikan kebijakan penuh dalam penayangan berita tanpa adanya jalur koordinasi dari pemilik media dalam hal ini Pemerintah Daerah yang sangat rentang dengan intervensi pemberitaan demikian pula dengan Posisi Sinjai TV dalam perhelatan politik, guna melaksanakan tugas jurnalistik loyalitas media kepada penentu kebijakan melahirkan keberpihakan berita sehingga bermuara pada informasi yang subjektif atas keputusan yang diambil oleh pemilik media yang dapat menghambat obyektifitas yang disiarkan kepada masyarakat dalam penyebaran berita politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Cangara H. (2014). *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meadow (1980). *Politics as communication*. Norwood: Ablex Publisher
- Hamad I. (2004). *Konstruksi Realitas Politik dalam media Massa*. Jakarta: Granit
- John & Kareen A. (2009). *Teori Komunikasi (theories of human communication) edisi 9*. Salemba Humanika: Jakarta.
- Muhtadi dkk. (1999). *Jurnalistik Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Logos.
- McQuail. (1992). *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*. Jakarta: edisi ke-2 Erlangga.
- Nimmo D. (2000). *Komunikasi Politik*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nur Hidayat D. (2005). *Pengantar Komunikasi Massa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Unde A. (2014). *Televisi & Masyarakat Pluralistik*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Subroto dkk. (1994) *Produksi acara televisi*. Yogyakarta: Duta Wacana Universty press.